

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Mukthie, Fadjar. Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi. (Malang: Setara Press, 2013).
- Anriani, Stepi. Intelejen & Pilkada: Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Asy'ari, Hasyim. Pilkada: Catatan Hukum dan Politik. (Semarang: Diponegoro University Press, 2007).
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003).
- Fahmi, Khairul. Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Gaffar, M Janedjri. Politik Hukum Pemilu. (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Kansil, C.S.T. Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Yogyakarta: UNY Press, 1986).
- _____ dan Christine S.T. Kantil. Pokok-Pokok Etika dan Profesi Hukum. (Cetakan Ketiga). (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006).
- MD, Mahfud. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Nazir, Mohammad. Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Edisi V). (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

Rasyid, M. Ryaas. Metode Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. (Jakarta: Yarsif Watampone, 2002).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

_____ dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004).

Soemitro, Roni Hanitjo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Suharizal. Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Waluya, Bagja. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007).

Wijayanti, Septi Nur dan Iwan Satriawan. Hukum Tata Negara (Teori dan Prakteknya di Indonesia). (Yogyakarta: LP3M UMY, 2009).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 01/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 02/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 04/PL.03.2-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 10/PL.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 15/PL.03.3-Kpt/3319/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 16/PL.03.3-Kpt/3319/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 57/PL.03.7-Kpt/3319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018.

Jurnal

Adiluhung, Sacra Insan Sing. Kajian Normatif Terhadap Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan. (Universitas Diponegoro, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2, 2017).

Pramusinto, Agus. Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004. (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS, Volume 33 Nomor 2, 2004).

Pratikno. Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol. (Universitas Gajah Mada, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10 Nomor 3, 2007).

Purba, Ardyantha Sivadabert. Potret Pandangan Akademisi di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) UGM Mengenai Permasalahan Demokrasi di Indonesia. (Universitas Airlangga, Jurnal Politik Muda, Volume 4 Nomor 1, 2015).

Saraswati, Retno. Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pemilukada, (Universitas Diponegoro, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Nomor 2 Jilid 40, 2011).

Internet

Siddiq, Mahfudz. Pengaturan Calon Perseorangan dalam Pilkada, dalam Skripsi Alfarioni, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, diakses dari http://repository.uin-suska.ac.id/2906/1/2013_201356IH.pdf pada tanggal 25 Januari 2019.

Wawancara

Wawancara Penulis dengan Pengamat Politik, Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H, pada tanggal 18 Desember 2018.

Wawancara Penulis dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Periode 2018-2023, Nailly Syarifah, S.Psi, pada tanggal 14 Maret 2019.